

ANALISIS VECTOR AUTOREGRESSION (VAR) TERHADAP HUBUNGAN ANTARA BI RATE DAN INFLASI

Yenni Samri Juliati Nasution

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Abstract

Standard monetary policy is mirrored by the determination of the policy rate (BI Rate) which is expected to affect the money market interest rates and deposit rates and bank lending rates. These interest rate changes will ultimately affect output and inflation. The operational objective of monetary policy is reflected in the development of interest rates Overnight interbank money market (interbank O/N). Movements in interbank rates is expected to be followed by the development in interest rates on deposits, and in turn in bank lending rates. Taking also into account other factors in the economy. BI Rate announced by the Board of Governors of Bank Indonesia each meeting of the Board of Governors (RDG) monthly and implemented on monetary operations conducted by Bank Indonesia through the management of liquidity (liquidity management) in the money market to achieve the monetary policy operational target.

Kata Kunci: BI Rate, Moneter, Inflasi,

A. Pendahuluan

BI Rate adalah tingkat suku bunga yang dijadikan acuan untuk bunga pinjaman (pengusaha yang berhutang) ataupun bunga simpanan (tabungan, deposito, dan lain-lain) pada bank dan lembaga keuangan seluruh Indonesia. Biasanya BI Rate disebut dalam persen, per tahun. Saat ini, sedang banyak berita tentang

kenaikan BI Rate menjadi 7,25% per tahun. Biasanya (namun tak selalu), BI Rate dinaikkan guna menurunkan tingkat inflasi.

Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan. Penelitian dengan judul "*Analisis Vector Autoregression (VAR)* terhadap hubungan antara BI Rate dan Inflasi" ini dimaksudkan untuk menganalisis secara empiris, apakah terdapat indikasi hubungan antara BI Rate dan inflasi maupun sebaliknya Inflasi dipengaruhi BI Rate.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah terdapat hubungan antara BI Rate dan Inflasi.

C. Metodologi Penelitian

1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa *time series* bulanan yang didapat dari Statistik Perbankan Indonesia pada Bank Indonesia (SPI-BI/OJK). Data dimaksud adalah series bulanan BI rate dan inflasi kurun waktu mulai bulan Januari tahun 2006 sampai dengan bulan Desember 2014.

2. Metode Estimasi

Permasalahan dalam studi ini akan dianalisis dengan memakai *Vector Autoregression*. Secara sederhana, VAR menggambarkan hubungan yang "saling menyebabkan" (kausalistis) antarvariabel dalam sistem, dengan menambahkan *intercept*. metode ini mulai dikembangkan oleh Sims pada tahun

1980 (Tanjung dan Devi, 2013:261) yang mengasumsikan bahwa semua variabel dalam model bersifat endogen (ditentukan di dalam model) sehingga metode ini disebut sebagai model yang ateoritis (tidak berdasar teori).

a) Uji Stationeritas

Data ekonomi *time series* umumnya bersifat stokastik atau memiliki tren yang tidak stasioner, artinya data tersebut memiliki akar unit. Untuk dapat mengestimasi suatu model menggunakan data tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pengujian stasioneritas data atau dikenal dengan *unit root test*. (Gujarati, 2003).

b) Pemilihan Lag Optimum

Penentuan jumlah *lag* (ordo) yang akan digunakan dalam model VAR dapat ditentukan berdasarkan kriteria *Akaike Information Criterion* (AIC) dan *Schwarz Information Criterion* (SC). *Lag* yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah model dengan nilai AIC yang paling kecil. Dalam tahapan ini pula dilakukan uji stabilitas model VAR. Penentuan *lag* optimum dan uji stabilitas VAR dilakukan terlebih dahulu sebelum melalui tahap uji kointegrasi.

c) Uji Stabilitas

Untuk menguji stabil atau tidaknya estimasi VAR yang telah dibentuk maka dilakukan pengecekan kondisi *VAR stability* berupa *roots of characteristic polynomial*. Suatu sistem VAR dikatakan stabil apabila seluruh *roots*-nya memiliki modulus lebih kecil dari satu (Gujarati, 2003).

d) Uji Kointegrasi

Jika fenomena stasioneritas berada pada tingkat *first difference* atau $I(1)$, maka perlu dilakukan pengujian untuk melihat kemungkinan terjadinya kointegrasi. Konsep kointegrasi pada

dasarnya untuk melihat keseimbangan jangka panjang di antara variabel-variabel yang diobservasi. Terkadang suatu data yang secara individu tidak stasioner, namun ketika dihubungkan secara linier data tersebut menjadi stasioner. Hal ini yang kemudian disebut bahwa data tersebut terkointegrasi. Apabila satu set variabel benar-benar terkointegrasi, maka harus dapat dideteksi *implied* restriksi atau unrestriksi VAR (Green, 2000: 794).

e) ***Vector Error Correction Model (VECM)***

VECM adalah bentuk *Vector Autoregression* yang terestriksi. Restriksi tambahan ini harus diberikan karena keberadaan bentuk data yang tidak stasioner namun terkointegrasi. VECM kemudian memanfaatkan informasi restriksi kointegrasi tersebut ke dalam spesifikasinya. Karena itulah VECM sering disebut desain VAR bagi *series nonstasioner* yang memiliki hubungan kointegrasi (Tanjung dan Devi, 2013: 269).

f) ***Instrumen Vector Autoregression***

Dalam melakukan analisisnya, VAR memiliki instrument spesifik yang memiliki fungsi spesifik dalam menjelaskan interaksi antarvariabel dalam model. Instrumen itu meliputi *Impulse Response Function* (IRF) dan *Forecast Error Variance Decompositions* (FEVD), atau biasa disebut *Variance Decomposition* (VD). IRF merupakan aplikasi *vector moving average* yang bertujuan melihat seberapa lama guncangan dari satu variabel berpengaruh terhadap variabel lain. Sedangkan VD dalam VAR berfungsi untuk menganalisis seberapa besar guncangan dari sebuah variabel mempengaruhi variabel lain.

D. Tinjauan Pustaka

1. BI Rate

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.

BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan.

BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Penetapan respons (*stance*) kebijakan moneter dilakukan setiap bulan melalui mekanisme RDG Bulanan dengan cakupan materi bulanan.
- 2) Respons kebijakan moneter (BI Rate) ditetapkan berlaku sampai dengan RDG berikutnya.
- 3) Penetapan respons kebijakan moneter (BI Rate) dilakukan dengan memperhatikan efek tunda kebijakan moneter (*lag of monetary policy*) dalam mempengaruhi inflasi.

- 4) Dalam hal terjadi perkembangan di luar prakiraan semula, penetapan *Stance* Kebijakan Moneter dapat dilakukan sebelum RDG Bulanan melalui RDG Mingguan.

Respon kebijakan moneter dinyatakan dalam perubahan BI Rate (secara konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 basis poin (bps). Dalam kondisi untuk menunjukkan intensi Bank Indonesia yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran inflasi, maka perubahan BI Rate dapat dilakukan lebih dari 25 bps dalam kelipatan 25 bps.

Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate. Penetapan respons (*stance*) kebijakan moneter dilakukan setiap bulan melalui mekanisme RDG Bulanan dengan cakupan materi bulanan.

- 1) Respon kebijakan moneter (BI Rate) ditetapkan berlaku sampai dengan RDG berikutnya.
- 2) Penetapan respon kebijakan moneter (BI Rate) dilakukan dengan memperhatikan efek tunda kebijakan moneter (*lag of monetary policy*) dalam memengaruhi inflasi.
- 3) Dalam hal terjadi perkembangan di luar prakiraan semula, penetapan *stance* Kebijakan Moneter dapat dilakukan sebelum RDG Bulanan melalui RDG Mingguan.

Besar Perubahan BI Rate

Respon kebijakan moneter dinyatakan dalam perubahan BI Rate (secara konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 *basis poin* (bps). Dalam kondisi untuk menunjukkan intensi Bank Indonesia yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran inflasi, maka

perubahan BI Rate dapat dilakukan lebih dari 25 bps dalam kelipatan 25 bps.

2. Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Sedangkan tingkat inflasi menunjukkan persentase perubahan tingkat harga rata-rata tertimbang untuk barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara. Berikut ini faktor-faktor penyebab terjadinya inflasi adalah sebagai berikut:

a) Naiknya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa

Ketika pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS), biasanya diikuti dengan kenaikan permintaan barang dan jasa. Bila kenaikan besarnya permintaan ini tidak diimbangi dengan penambahan volume barang dan jasa di pasar, maka hal ini akan berakibat pada naiknya harga barang dan jasa. Kenaikan gaji PNS ini pada dasarnya mengidikasikan adanya kenaikan jumlah uang yang beredar. Jenis inflasi ini disebut *demand-pull inflation*.

b) Kenaikan biaya produksi

Pada waktu pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), maka harga barang-barang di pasar juga akan meningkat. Karena kenaikan harga BBM berdampak pada kenaikan biaya produksi, akibatnya perusahaan juga menaikkan harga jual barang dan jasanya. Disini terjadi *cost-push inflation*.

c) Defisit anggaran belanja (APBN)

Defisit APBN yang ditutup dengan percetakan uang baru oleh Bank Indonesia, akan berakibat pada bertambahnya jumlah uang beredar, Dimana hal ini akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa.

d) Menurunnya nilai tukar rupiah

Menurunnya nilai tukar terhadap valuta asing, seperti US dollar, Yen, Deutsche Mark, akan berdampak pada semakin mahalannya barang-barang produksi impor. Hal ini berakibat pada kenaikan biaya produksi.

Dampak Inflasi

1) Dampak Positif Inflasi

Apabila inflasi yang terjadi ringan, akan mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu:

- (a) Meningkatkan pendapatan nasional
- (b) Membuat orang bergairah untuk bekerja,
- (c) Menabung dan mengadakan investasi.
- (d) Bagi orang yang meminjam uang kepada bank (debitur), inflasi menguntungkan, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam.
- (e) Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar).

2) Dampak Negatif Inflasi

Adapun dampak-dampak pada saat terjadi inflasi yang tak terkendali (hiperinflasi), antara lain:

- (a) Orang menjadi tidak bersemangat bekerja, menabung, mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Masyarakat enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Walaupun tabungan

menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi di atas bunga, nilai uang tetap menurun. Bila orang enggan menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Karena, untuk berkembang dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat

- (b) Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

Dari berbagai dampak yang timbul tersebut muncul berbagai pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan sebagai dampak adanya inflasi. Pihak-pihak tersebut antara lain:

Pihak Yang Diuntungkan:

- a. Para pengusaha yang pada saat sebelum terjadinya inflasi, telah memiliki stock/persediaan produksi barang yang siap dijual dalam jumlah besar.
- b. Para pedagang yang dengan terjadinya inflasi menggunakan kesempatan memainkan harga barang. Cara yang dipakai adalah dengan menaikkan harga, karena ingin mendapatkan laba/keuntungan yang besar.
- c. Para spekulan yaitu orang-orang atau badan usaha yang mengadakan spekulasi, dengan cara menimbun barang sebanyak-banyaknya sebelum terjadinya inflasi dan menjualnya kembali pada saat inflasi terjadi, sehingga terjadinya kenaikan harga sangat menguntungkan mereka.
- d. Para peminjam karena pinjaman telah diambil sebelum harga barang-barang naik, sehingga nilai riil-nya lebih tinggi daripada sesudah inflasi terjadi, tetapi peminjam membayar kembali tetap sesuai dengan perjanjian yang dibuat sebelum terjadi inflasi.

Pihak Yang Dirugikan:

- a) Para konsumen, karena harus membayar lebih mahal, sehingga barang yang diperoleh lebih sedikit jika dibandingkan dengan sebelum terjadinya inflasi.
- b) Mereka yang berpenghasilan tetap, karena dengan penghasilan tetap, naiknya harga barang-barang dan jasa, mengakibatkan jumlah barang-barang dan jasa yang dapat dibeli menjadi lebih sedikit, sehingga pendapatan riil/nyata berkurang, sedangkan kenaikan penghasilan atau pendapatan pada saat terjadi inflasi sulit diharapkan.
- c) Para pemborong atau kontraktor, karena harus mengeluarkan tambahan biaya agar dapat menutup pengeluaran-pengeluaran yang diakibatkan terjadinya inflasi dan mengakibatkan berkurangnya keuntungan yang diperoleh dari proyek yang dikerjakan.
- d) Para pemberi pinjaman/kreditor, karena nilai riil dari pinjaman yang telah diberikan menjadi lebih kecil sebagai akibat terjadinya inflasi.

Cara Mengatasi Inflasi

Dalam menyikapi inflasi agar tidak berkepanjangan dan tidak berpengaruh yang besar terhadap kondisi perekonomian Indonesia, maka pemerintah melakukan berbagai kebijakan antara lain

a. Kebijakan Moneter.

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Pemerintah Indonesia lebih banyak menggunakan pendekatan moneter dalam upaya mengendalikan tingkat harga umum. Pada umumnya pendekatan moneter dipakai untuk mengatasi inflasi jangka pendek.

Kebijakan ini meliputi:

- a) Politik diskonto dan bunga pinjaman: Dengan mengurangi jumlah uang yang beredar, dapat dilakukan dengan cara menaikkan suku bunga bank, hal ini diharapkan permintaan kredit akan berkurang.
- b) Politik pasar terbuka: Bank sentral menjual obligasi atau surat berharga ke pasar modal untuk menyerap uang dari masyarakat dan dengan menjual surat berharga bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar sehingga jumlah uang beredar dapat dikurangi dan laju inflasi dapat lebih rendah.
- c) Peningkatan cash ratio: Menaikkan cadangan uang kas yang ada di bank sehingga jumlah uang bank yang dapat dipinjamkan kepada debitur/masyarakat menjadi berkurang. Hal ini berarti dapat mengurangi jumlah uang yang beredar.
- d) Kredit selektif, politik bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat pemberian kredit.
- e) Penanggulangan inflasi yang sangat parah (*hyper inflation*) ditempuh dengan cara melakukan *sneering* (pemotongan nilai mata uang). Sneering ini pernah dilakukan oleh BI pada tanggal 13 Desember 1965 yang melakukan pemotongan nilai mata uang pecahan Rp. 1.000,00 menjadi Rp. 1,00, pada saat itu inflasi mencapai 650%.

b. Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang berhubungan dengan finansial pemerintah. Bentuk kebijakan ini antara lain:

- a) Pengurangan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan.
- b) Menaikkan pajak, akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat berkurang dan ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun, dan tentunya permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif tentunya berkurang.

c) Mengadakan pinjaman pemerintah, misalnya pemerintah memotong gaji pegawai negeri 10% untuk ditabung, ini terjadi pada masa orde lama.

c. Kebijakan Non- Moneter

Kebijakan Non-Moneter dapat dilakukan dengan cara menaikkan hasil produksi, kebijakan upah dan pengawasan harga dan distribusi barang.

a) Menaikan hasil produksi, cara ini cukup efektif mengingat inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar.

b) Kebijakan upah, merupakan upaya menstabilkan upah/gaji, dalam pengertian bahwa upah tidak sering dinaikan karena kenaikan yang relatif sering dilakukan akan meningkatkan daya beli dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang secara keseluruhan dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi.

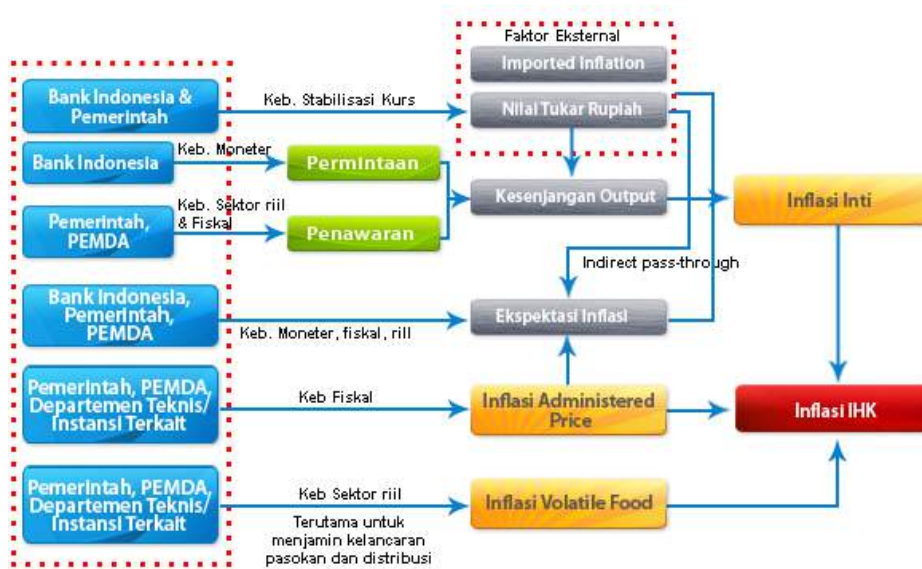
c) Pengawasan harga dan distribusi barang, dimaksudkan agar harga tidak terjadi kenaikan, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga tertinggi (harga eceran tertinggi/HET). Pengendalian harga yang baik tidak akan berhasil tanpa ada pengawasan. Pengawasan yang baik biasanya akan menimbulkan pasar gelap. Untuk menghindari pasar gelap maka distribusi barang harus dapat dilakukan dengan lancar.

d) Kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan jumlah output dapat dicapai misalnya dengan kebijakan penurunan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Dengan bertambahnya jumlah barang di dalam negeri cenderung akan menurunkan harga. Kebijakan penentuan harga dan indexing ini dilakukan dengan penentuan *ceiling price*.

d. Kebijakan Sektor Riil

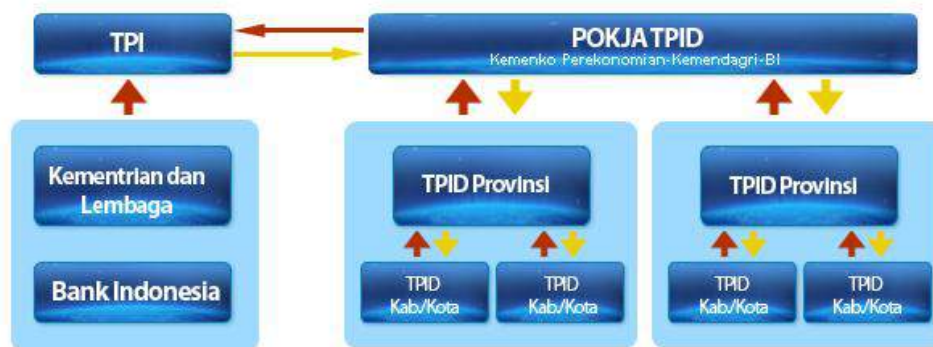
- a) Pemerintah menstimulus bank untuk memberikan kredit lebih spesifik kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Contohnya bank BRI mencanangkan tahun ini sebagai Microyear.
- b) Menekan arus barang impor dengan cara menaikkan pajak.
- c) Menstimulus masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sumber tekanan inflasi Indonesia tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia. Dari hasil beberapa penelitian, karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak yang terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (sisi penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah. Selain itu, *shocks* terhadap inflasi juga dapat berasal dari kebijakan pemerintah terkait harga komoditas strategis seperti BBM dan komoditas energi lainnya (*administered prices*). Berdasarkan karakteristik inflasi yang masih rentan terhadap *shocks* tersebut, untuk mencapai inflasi yang rendah, pengendalian inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas instansi, yakni antara Bank Indonesia dengan Pemerintah. Diharapkan dengan adanya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tersebut, inflasi yang rendah dan stabil dapat tercapai yang pada gilirannya mendukung kesejahteraan masyarakat.



Gambar I. Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Pemerintah Dalam Pengendalian Inflasi

Menyadari pentingnya peran koordinasi dalam rangka pencapaian inflasi yang rendah dan stabil, Pemerintah dan Bank Indonesia membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di level pusat sejak tahun 2005. Penguatan koordinasi kemudian dilanjutkan dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi di level daerah (TPID) pada tahun 2008. Selanjutnya, untuk menjembatani tugas dan peran TPI di level pusat dan TPID di daerah, maka pada Juli 2011 terbentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID yang diharapkan dapat menjadi katalisator yang dapat memperkuat efektivitas peran TPID. Keanggotaan Pokjanas TPID adalah Bank Indonesia, Kemenko Perekonomian dan Kemendagri.



Gambar II. Keterkaitan Antara TPI, Pokjanas TPID dan TPID

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (*Inflation Targeting Framework*) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (*free floating*). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-

instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

3. Indeks Harga Konsumen

Indeks harga konsumen (*consumer price index*) adalah nomor indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga (*household*). IHK sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi suatu negara dan juga sebagai pertimbangan untuk penyesuaian gaji, upah, uang pensiun, dan kontrak lainnya. Untuk memperkirakan nilai IHK pada masa depan, ekonom menggunakan indeks harga produsen, yaitu harga rata-rata bahan mentah yang dibutuhkan produsen untuk membuat produknya. Untuk mengukur tingkat harga secara makro, biasanya menggunakan pengukuran Indeks Harga Konsumen (IHK) atau *Consumer Price Indeks* (CPI). Indeks Harga Konsumen (IHK) dapat diartikan sebagai indeks harga dari biaya sekumpulan barang konsumsi yang masing-masing diberi bobot menurut proporsi belanja masyarakat untuk komoditi yang bersangkutan. IHK mengukur harga sekumpulan barang tertentu (seperti bahan makanan pokok, sandang, perumahan, dan aneka barang dan jasa) yang dibeli konsumen.

Indeks Harga Konsumen (IHK) memberikan informasi mengenai perkembangan rata-rata perubahan harga sekelompok tetap barang/ jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh rumah tangga dalam suatu kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) harga barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Dalam banyak keperluan dan perhitungannya, harga yang digunakan harus menggambarkan harga yang berlaku dalam suatu negara. Untuk itu dibuat besaran yang dapat menggambarkan tingkat perubahan harga-harga secara umum. Besaran harga ini dinyatakan dalam indeks harga. Indeks harga yang umum digunakan untuk menyatakan tingkat harga dari barang-barang yang selalu diperlukan oleh konsumen disebut indeks harga konsumen (IHK). IHK adalah suatu indeks yang mengukur perubahan harga rata-rata tertimbang dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga (*household*) atau masyarakat dalam waktu tertentu. Nilai IHK menunjukkan rata-rata perubahan harga yang dibayarkan oleh konsumen dari sekelompok barang dan jasa tertentu.

Indeks harga dihitung dengan memilih tahun dasar yang menjadi basis pembandingan perubahan harga. Beberapa jenis barang dipilih untuk membentuk indeks harga. Setiap barang yang dipilih diberi nilai kepentingan relative atau *weightage* yang menunjukkan bobot dari barang tersebut. Barang yang sangat diperlukan oleh masyarakat diberi bobot yang tinggi.

Di Indonesia, sejak bulan Juni tahun 2008, IHK Indonesia dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2007, IHK pada tahun 2007 adalah 100. Total Kota yang disurvei adalah 66 kota, yang terdiri dari 33 ibukota propinsi dan 33 kota-kota besar. IHK sebelum tahun 2008 menggunakan tahun dasar 2002 dan kota yang disurvei hanya 45 kota. Total barang dan jasa yang diamati antara 284-441 jenis, dan dikelompokkan menjadi tujuh kelompok pengeluaran yaitu:

1. Bahan makanan.
2. Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau.
3. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar.
4. Sandang.

5. Kesehatan.
6. Pendidikan, rekreasi dan olah raga.
7. Transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian Erni Indah Sari, Ervita Safitri, Ratna Juwita (2010) dengan judul “ Pengaruh Inflasi dan Tingkat Suku Bunga terhadap Return Saham PT Indofood Sukses makmur Tbk” menganalisis pengaruh tingkat suku bunga bank konvensional sebagai salah satu faktor dalam penentuan margin bagi hasil di bank syariah hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara inflasi dan tingkat suku bunga terhadap return saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk baik secara simultan maupun parsial. Penelitian Lourence M.AM, Gusmao (Ado), 2011, Skripsi: “ Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Tingkat Inflasi Terhadap Minat Menabung Konsumen (Studi di Dilli Timor Leste). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara tingkat suku bunga dan inflasi terhadap minat menabung konsumen.

Akhmad Sodikin (2007) melakukan penelitian tentang Variabel Makroekonomi Yang Mempengaruhi Return Saham Di BEJ . Hasil penelitian menunjukkan variabel makroekonomi (nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga dan tingkat inflasi) tidak berpengaruh secara parsial terhadap return saham industri pertanian, aneka industri, barang konsumsi, infrastruktur dan jasa. Pada saham industri pertambangan, kimia, konstruksi dan keuangan hanya tingkat suku bunga yang berpengaruh secara parsial terhadap return saham. Pada saham industri pertanian, pertambangan, barang konsumsi, keuangan, konstruksi, infrastruktur dan jasa variabel makroekonomi (nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga dan tingkat inflasi) tidak berpengaruh secara simultan terhadap return saham.

E. Pembahasan

1. Uji Stationer Data

Uji stationer data dapat dilakukan dengan metode grafik dan metode akar unit. Uji akar unit digunakan *uji augmented Dickey-Fuller* (ADF) jika nilai absolut statistik t lebih kecil dari nilai kritis pada table MacKinnon pada berbagai tingkat kepercayaan (1%, 5% dan 10%), maka mengindikasikan data tidak stationer. Disamping itu dapat pula dilihat pada nilai prob yang lebih besar dari 0,05 yang juga menindikasikan data tidak stationer (Winarno, 2007, 11-4). Sebaliknya jika nilai ADF lebih besar dari nilai kritis berbagai tingkat kepercayaan (1%, 5% dan 10%), maka tidak terdapat akar unit atau data stationer.

Tabel 1. Hasil uji ADF Variabel Unit Root Include in test Equation
ADF Test Statistic Critical Value 5%

Null Hypothesis: BIRATE has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.334240	0.0158
Test critical values: 1% level	-3.493747	
5% level	-2.889200	
10% level	-2.581596	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(BIRATE)

Method: Least Squares

Date: 04/04/15 Time: 20:19

Sample (adjusted): 2006M04 2014M12

Included observations: 105 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
	-			
BIRATE(-1)	0.035198	0.010556	-3.334240	0.0012
D(BIRATE(-1))	0.371015	0.095077	3.902239	0.0002
D(BIRATE(-2))	0.202363	0.093264	2.169776	0.0324
C	0.247629	0.080737	3.067101	0.0028
R-squared	0.401955	Mean dependent var	0.047619	
Adjusted R-squared	0.384192	S.D. dependent var	0.224934	
S.E. of regression	0.176513	Akaike info criterion	0.593489	
Sum squared resid	3.146855	Schwarz criterion	0.492386	
Log likelihood	35.15819	F-statistic	22.62789	
Durbin-Watson stat	2.046048	Prob(F-statistic)	0.000000	

Keterangan

Dari tabel 1 dapat dijelaskan bahwa nilai ADF test untuk BI Rate lebih besar dari nilai kritis 5% atau tidak stationer baik pada level maupun pada First Different. Selanjutnya dilakukan uji stationer variable inflasi pada second different. Adapun uji stationer terhadap variable

inflasi menunjukkan variabel telah stationer pada tingkat level.

2. Uji Panjang Lag Optimal

Pendekatan VAR sangat sensitif terhadap jumlah *lag* data yang digunakan, oleh karenanya perlu ditetapkan panjang *lag* yang optimal. Penentuan panjang *lag* tersebut dimanfaatkan untuk mengetahui lamanya periode keterpengaruhan terhadap suatu variabel endogen dengan pada waktu waktu yang lalu maupun terhadap variabel endogen lainnya. Penentuan panjang lag dapat dilihat dari nilai nilai dari *Likelihood Ratio* (LR), *Final Prediction Error* (FPE), *Akaike Information Criterion* (AIC) dan *Schwarz Information Criterion* (SC).

3. Hasil Uji Stabilitas VAR

Untuk menguji stabil atau tidaknya estimasi VAR yang telah ditentukan maka dilakukan *VAR condition Stability Check* yakni berupa *roots of characteristic polynomial*. Suatu model VAR dikatakan stabil jika seluruh rootsnya memiliki modulus lebih kecil dari 1 (Gujarati, 2003).

Berikut ini hasil uji Stabilitas VAR yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Hasil Uji Stabilitas Model Roots of Characteristic Polynomial Endogenous variables: D(BI Rate,2) D(Inflasi,2) Exogenous variables: C Lag specification: 2

Dependent Variable: BIRATE

Method: Least Squares

Date: 04/04/15 Time: 20:53

Sample: 2006M01 2014M12

Included observations: 108

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INFLASI	0.970477	0.027543	35.23525	0.0000
R-squared	0.500078	Mean dependent var	7.671296	
Adjusted R-squared	0.500078	S.D. dependent var	1.821358	
S.E. of regression	2.230758	Akaike info criterion	4.451776	
Sum squared resid	532.4619	Schwarz criterion	4.476610	
Log likelihood	239.3959	Durbin-Watson stat	0.203536	

Date: 06/02/14 Time: 09:30

4. Analisis Causality Granger

Uji Kausalitas *Granger* antarvariabel penelitian dimaksud untuk mengetahui hubungan kausalitas antara variabel (Nachrowi, 2006: 289).

5. Uji Kointegrasi

Dua variable yang tidak stationer sebelum didifferensi, namun stationer pada tingkat differensi pertama, besar kemungkinan terjadi kointegrasi. Kointegrasi berarti terdapat hubungan jangka panjang (keseimbangan). Dalam jangka pendek ada kemungkinan terjadi ketidak seimbangan (disekuilibrium). Karena adanya ketidak seimbangan ini maka diperlukan adanya koreksi dengan model koreksi kesalahan (*Error BI Rate Correction Model*) yang diperkenalkan Sarga, dikembangkan Hendry dan dipopulerkan Engle dan Granger (Winarno, 2006: 11.7-11.9).

Ada tiga cara menguji kointegrasi, yaitu 1) Uji Kointegrasi *Engle Grenger* 2) Uji Kointegrasi *Regression Durbin Watson* 3) Uji

Johansen. Penelitian ini menggunakan uji Johansen, dengan uji *Johansen*, dibandingkan nilai trace statistic dengan nilai kritis pada tingkat keyakinan 5% maupun 1%. Apabila nilai *trace statistic*-nya lebih kecil dibanding nilai kritis maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tidak saling berkointegrasi (Winarno, 2006: 11.7). Melalui pengujian kointegrasi Johansen's pada tabel 5 dibawah ini, tampak nilai *trace statistic > critical value* pada tingkat keyakinan 5%. Dengan demikian mengindikasikan kedua variabel saling berkointegrasi. Kointegrasi ini ditunjukkan pula pada catatan dibawah tabel yang berbunyi "Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level".

Indikator berikutnya bahwa, berdasarkan hasil uji kointegrasi didapati tanda kointegrasi dengan lambang (*) pada at most 1. Jika terdapat ditandai (**) atau (*) minimal satu, maka persamaan tersebut harus diselesaikan dengan metode VECM (*Vector Error Correction Model*).

Berdasarkan uji Kointegrasi *Johansen's* terhadap kedua variabel pada sistem persamaan dapat diketahui jumlah hubungan yang mungkin. Terlihat pada tabel diatas bahwa terdapat ;

1. Pada *trace Test* mengidentifikasi terdapat 1 persamaan kointegrasi pada level 5%.
2. Pada *Max Eigenvalue test* mengidentifikasi terdapat persamaan kointegrasi pada level 5%.

Dengan demikian antara variabel Suku bunga dan Bagi Hasil terdapat hubungan stabilitas keseimbangan jangka panjang dan pergerakan dalam jangka panjang. Sementara dalam jangka pendek seluruh variable saling menyesuaikan untuk mencapai keseimbangan jangka panjang.

G. Model BI Rate dan Inflasi

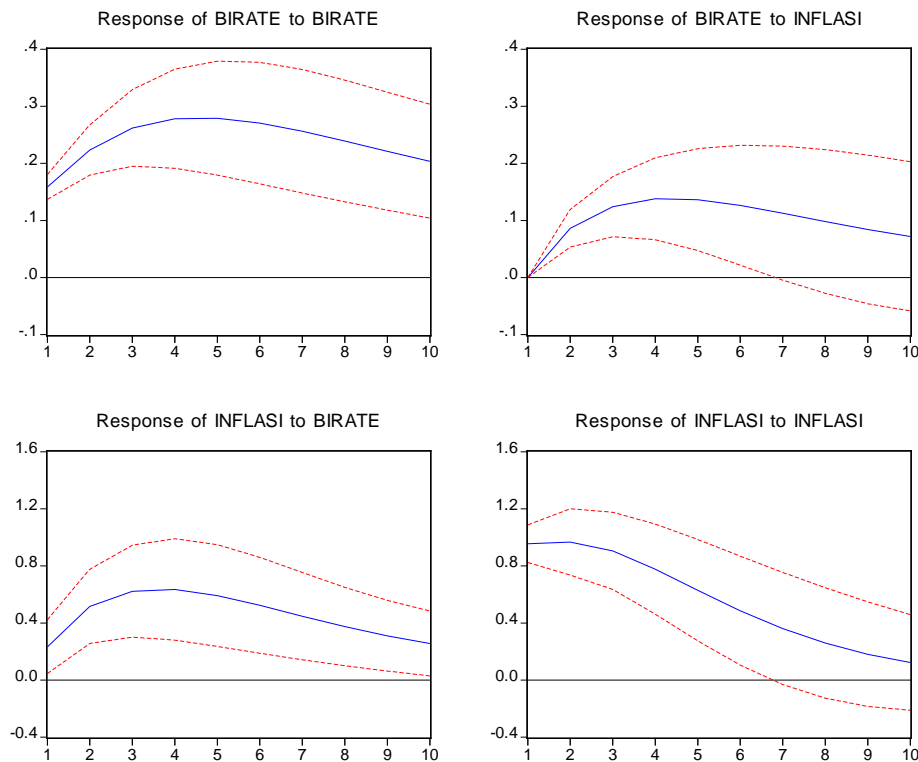
1. Analisis *Impulse Respon.*

Hasil analisis *impulse response function* untuk model untuk *difference* BI rate dapat dijelaskan pada tabel 6. berikut ini

Tabel 6. Respon Difference Indeks Model

Model BI Rate	Respon Difference Inflasi
Guncangan Difference Inflasi	Positif, naik kemudian mulai menurun periode 7 sampai 10
Guncangan Difference BI rate	Negatif mulai periode pertama sampai periode ke 10
Guncangan Difference BI rate terhadap inflasi	Menurun sampai periode ketiga, kemudian naik sampai periode sepuluh
Respon inflasi terhadap BI rate	Menurun tajam sampai periode dua dan kemudian menurun perlahan

Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.



F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang “Pengaruh BI rate, Inflasi dan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan hasil *analisis impuls respon function* pada model BI rate positif meningkat terus sampai puncaknya pada periode ke 4 selanjutnya positif menurun secara perlahan sampai periode ke Sembilan.
2. Respon BI Rate terhadap differens Inflasi terlihat meningkat mulai periode pertama sampai periode ke empat sampai sembilan.

Daftar Pustaka

Gujarati, N. Damodar, 2003, *Ekonometrika Dasar*, Terjemahan. Jakarta Green, William H. 2000, *Econometric Analysis*, Fourth Edition, New Jersey: Prentice Hall Inc.

Nachrowi, 2006, *Ekonometrika*, Jakarta: LPFEUI.

http://eprints.mdp.ac.id/751/1/JURNAL_2009200055_ERNI_INDAH_SARI.pdf, “ Pengaruh Inflasi dan Tingkat Suku Bunga terhadap Return Saham PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.

Pohan, Aulia. 2008, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sukirno, Sadono 2008 , *Teori Pengantar Makroekonomi* , edisi 3 , Rajawali Pers, Jakarta.

Lourence M.AM, Gusmao (Ado), 2011, Skripsi: “ *Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Tingkat Inflasi Terhadap Minat Menabung Konsumen (Studi di Dilli Timor Leste)*.

Tanjung, Hendri dan Devi, Abrista. 2013. *Metodologi penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing

Winarno, Wing Wahyu, 2007, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN